

Turniti Jurnal Tina

by Hamba Allah

Submission date: 27-Dec-2022 04:28PM (UTC+0900)

Submission ID: 1986855121

File name: Jurnal_Tina_Maylani_1.docx (74.58K)

Word count: 4336

Character count: 30302

URGENSI PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN MENGENAI PERIZINAN PENYIARAN BERBASIS INTERNET DI INDONESIA

Tina Maylani, Andriyanto Adhi Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta
tinamaylani@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi terkait pembaharuan Undang-Undang Penyiaran mengenai perizinan penyiaran berbasis internet di Indonesia. Perkembangan internet yang terus berkembang memberikan pengaruh kepada industri penyiaran dengan beralihnya penyiaran secara konvensional menuju penyiaran melalui internet. Dikarenakan penyiaran internet saat ini tidak tunduk pada UU Penyiaran dan termasuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik yang tunduk pada UU Telekomunikasi, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yaitu khususnya mengenai perizinan. Adanya ketidakharmonisan regulasi mengenai perizinan penyiaran secara konvensional dengan penyiaran menggunakan internet mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan kerugian bagi penyelenggara penyiaran konvensional. Oleh karena itu peraturan penyiaran memiliki urgensi untuk dilakukan pembaharuan mengingat perkembangan internet yang terus mendorong inovasi baru dan diharapkan dapat memberikan persamaan di dalam hukum dalam proses perizinan antara penyelenggara penyiaran baik secara konvensional maupun internet. Penelitian ini adalah jenis yuridis normatif serta pendekatan komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya perlakuan dalam proses perizinan yang berbeda menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio, maka Indonesia dapat melakukan penyesuaian dari penyiaran internet di Turki yaitu melakukan pembaharuan Undang-Undang Penyiaran dengan cara memperluas ruang lingkup penyiaran dengan memasukkan penyiaran internet. Dilakukan pembaharuan peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan adanya persamaan didalam hukum mengenai perizinan penyiaran secara konvensional dengan penyiaran berbasis internet.

Kata kunci: Internet;Pembaharuan;Penyiaran;Perizinan

THE URGENCY OF BROADCASTING LAW FOR INTERNET BASED BROADCASTING LICENSING IN INDONESIA

Abstract

The purpose of this research is to examine the urgency regarding the renewal of the Broadcasting Law regarding internet-based broadcasting licensing in Indonesia. The development of the internet which continues to grow has an

impact on the broadcasting industry by shifting from conventional broadcasting to digital broadcasting via the internet. Because internet broadcasting is currently not subject to Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and is included in the category of electronic system operators subject to Law Number 36 of 1990 concerning Telecommunications, this creates a problem, namely specifically regarding licensing. The existence of regulatory disharmony regarding conventional broadcasting licensing and broadcasting using the internet has resulted in different treatment, resulting in losses for conventional broadcasting operators. Therefore broadcasting regulations have an urgency to be updated considering the development of the internet which continues to encourage new innovations and is expected to provide equality in law in the licensing process between conventional broadcasting operators and broadcasting using the internet. This study uses a normative juridical method and a comparative approach. The results of this study are to suggest the government and the legislature to immediately reform the Broadcasting Law by expanding the scope of broadcasting by including internet broadcasting. It is hoped that the renewal of these regulations will provide equality in law regarding conventional broadcasting licenses and internet-based broadcasting.

Keywords: Internet; Renewal; Broadcasting; Licensing

1. PENDAHULUAN

Adanya perkembangan teknologi dan komunikasi yang terus meningkat memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Internet muncul dikarenakan dari adanya kemajuan teknologi. Di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 210 juta jiwa atau sebesar 77.02% penduduk yang telah terkoneksi internet, data ini diperoleh berdasarkan survei tahun 2021 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia.¹

Munculnya kemajuan internet memberikan pengaruh kepada bidang penyiaran. Berdasarkan hasil laporan dari Global Internet tahun 2019 bahwa total televisi dan pendengar radio mengalami penurunan dan berpindah ke saluran online menggunakan internet. Pada bulan Januari 2019 sebesar 92% pengguna internet menonton video online, dan 69% pengguna layanan streaming musik, serta 47% pengguna mendengarkan radio online.² Hal ini menunjukkan bahwa industri penyiaran mulai beralih dari konvensional menuju internet. Selanjutnya berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia tahun 2021 menyatakan konten internet yang sering diakses oleh masyarakat adalah media sosial sebesar 89.15%, selain media sosial masyarakat juga mengakses tv berbasis internet seperti Netflix sebesar 11.10% dan We Tv sebesar 7.84%.³

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Profil Internet Indonesia 2022," *Apji.or.Od*, no. June (2022): 10, apji.or.id.

² Elif Kalaycioglu and Dragan Nikodijević, "Radio and Television Supreme Council: Regulation on Internet Broadcasting in Turkey," *Komunikacije, Mediji, Kultura* 11, no. 11 (2019): 89–100, <https://doi.org/10.5937/gfkm1911089x>.

³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Profil Internet Indonesia 2022."

Dengan munculnya perkembangan internet yang dapat dijadikan sebuah media baru dalam penyiaran dilakukan untuk memperluas pasar, sehingga media penyiaran tidak bisa berdiam diri terhadap perkembangan ini, harus merespon terkait perkembangan internet agar dapat mempertahankan eksistensinya di masyarakat agar tidak tersingkirkan dengan cara menggabungkan media konvensional dengan media baru.⁴ Munculnya internet berpengaruh dalam proses digitalisasi yang dalam hal ini mampu untuk melahirkan media online yang terus berkembang sampai saat ini.⁵ Internet bukanlah pesaing bagi industri penyiaran, namun internet merupakan sebuah media untuk dapat dimanfaatkan sebagai media penyiaran.

Regulasi yang mengatur mengenai penyiaran di Indonesia tercantum dalam UU Penyiaran, selanjutnya disebut UU Penyiaran. Bahwa penyiaran dalam hal ini diselenggarakan oleh lembaga penyiaran. Oleh karena itu lembaga penyiaran untuk melakukan penyiaran harus mendapatkan izin penyelenggara penyiaran (IPP) terlebih dahulu. Izin penyelenggara penyiaran adalah suatu izin sebelum melakukan kegiatan penyiaran yang diberikan kepada lembaga penyiaran. Namun penyiaran menggunakan internet tidak terikat pada UU Penyiaran seperti prosedur izin penyelenggaraan penyiaran melalui internet yang mengakibatkan tidak sesuai tujuan maupun fungsi penyiaran yang tercantum dalam UU Penyiaran. Hal ini yang menyebabkan perilaku yang berbeda terhadap pelaku usaha yang kegiatan usahanya berfokus di industri penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang mengalami kerugian.⁶ Kemudian terdapat Putusan MK No. 39/PUU-XVIII/2020 yang mana RCTI dan iNews melakukan permohonan uji materiil mengenai Pasal 1 Ayat (2) UU Penyiaran dikarenakan sebagai penyelenggara penyiaran konvensional tunduk dan mematuhi persyaratan aturan yang terdapat di UU Penyiaran, namun seperti penyiaran berbasis internet dengan memanfaatkan layanan OTT (*over the top*) seperti *Youtube*, *Netflix* dan *Instagram* yang juga melakukan penyiaran tidak tunduk pada UU Penyiaran karena undang-undang ini belum mengatur hal tersebut.⁷ Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) dikatakan tidak mencangkup layanan berbasis internet, sehingga mengakibatkan ketidaksamaan dalam hukum penyiaran dan menyebabkan

⁴ M.Ag Imansyti Ciptanti Devi, Dr. Iswahyudi., "Strategi Konvergensi Radio Songgolangit FM Di Tengah Persaingan Industri Penyiaran Di Ponorogo" (2020).

⁵ Septiawan Santana Kurnia, *Jurnalisme Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

⁶ Reyhan Agung Munthe et al., "Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet Dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi Dan Radio," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 2 (2022): 130–42, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.61>.

⁷ Billy Nikolas Simanjuntak, "Konvensional Dan Penyediaan Layanan Aplikasi Dan / Atau Konten Melalui Internet Over-the-Top Dalam Perspektif Persaingan Usaha Yang Adil," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (2021): 1707, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=dharmasisya>.

perlakuan berbeda antar penyelenggara penyiaran, alasan ini yang menjadi dasar dalam mengajukan uji Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi.⁸ RCTI dan INews Tv dari adanya perbedaan tersebut merasa dirugikan karena sebelum melakukan kegiatan penyiaran harus berbadan hukum terlebih dahulu sampai mendapatkan izin penyelenggara penyiaran, berbeda dengan penyiaran berbasis internet atau OTT tidak perlu untuk memenuhi izin penyelenggara penyiaran.⁹ Namun permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Alvin Daniel Silaban, Muhammad Amirulloh dan Laina Rafianti¹⁰ (2020). Penelitian ini mengkaji mengenai bahwa penyelenggara penyiaran sebelum melakukan kegiatan penyiaran radio maupun televisi wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan penyiaran. Izin penyelenggara penyiaran adalah izin bagi penyelenggara penyiaran yang diterbitkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebelum melakukan kegiatan penyiaran sesuai dengan UU Penyiaran. Namun dengan munculnya digitalisasi penyiaran salah satu nya *podcast* yang penggunaannya disebarluaskan melalui internet tidak termasuk dalam ruang lingkup UU Penyiaran yang cakupannya hanya televisi dan radio. Oleh karena itu khususnya mengenai perizinan dalam penyiaran yang menggunakan *podcast* melalui internet tidak termasuk ruang lingkup penyiaran, sehingga hal ini tidak sesuai dengan tujuan dalam Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3PS) yang ditetapkan oleh KPI.

Penelitian yang dilakukan oleh Riza Ananda Putra (2021)¹¹ yang mengkaji dalam hal ini kegiatan penyiaran melalui platform media sosial saat ini dapat digunakan untuk kegiatan penyiaran, namun media sosial tidak diatur dalam UU Penyiaran. Maka dalam hal ini penyiaran menggunakan internet belum memiliki kepastian hukum karena belum diatur dalam UU tersebut. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya perlakuan yang berbeda antara penyelenggara penyiaran spektrum frekuensi radio secara

⁸ Eka Wenats Wuryanata Mokhammad Naigam Mahriva, "DOMINASI KEKUASAAN PEMILIK MEDIA DALAM WACANA PEMBARUAN UU PENYIARAN POWER DOMINATION OF MEDIA OWNERS IN THE DISCUSSION OF UPDATING THE BROADCASTING LAW," *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 25, no. 1 (2021): 77, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/3766>.

⁹ Fitria Safiratun Nabilah et al., "Menggugat UU Penyiaran Di Indonesia (Analisa Framing Pemberitaan Gugatan RCTI Dan INews TV Tentang UU 32 Tahun 2002 Pada SindoNews & Detik.Com Periode 27 Agustus-20 September 2020)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 9, no. 2 (2021): 74, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna/article/view/15860>.

¹⁰ Alvin Daniel Silaban, Muhammad Amirulloh, and Laina Rafianti, "Podcast: Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over the Top) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (2020): 129–43, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.8325>.

¹¹ Riza Ananda Putra (2021), "Konsekuensi Hukum Tindakan Penyiaran Oleh Media Sosial Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran," Skripsi 2021.

konvensional dengan penyelenggara penyiaran berbasis internet. Perlakuan yang berbeda ini dapat dilihat dari izin penyiaran bahwa penyelenggara penyiaran secara konvensional harus memiliki izin penyiaran terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penyiaran, berbeda dengan penyelenggara penyiaran berbasis internet yang melalui media sosial, atau *Youtube*, tidak diwajibkan untuk memiliki izin penyiaran, sehingga dapat bebas melakukan tindakan penyiaran karena tidak terikat pada UU Penyiaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Budiman (2022)¹² mengkaji bahwa siaran sekarang tidak hanya diselenggarakan oleh lembaga penyiaran namun dapat dilakukan oleh penyelenggara platform digital penyiaran dikarenakan adanya perkembangan teknologi dan internet. Karena saat ini penyelenggaraan platform digital penyiaran telah banyak diminati oleh masyarakat, namun terdapat permasalahan yaitu mengenai perizinan. Karena lembaga penyiaran televisi maupun radio harus memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sebelum melakukan kegiatan penyiaran, sedangkan penyelenggara platform digital penyiaran yang menggunakan internet tidak memiliki kewajiban untuk memiliki izin penyelenggaraan siaran. Padahal aspek perizinan adalah aspek yang cukup penting dan tahap pertama dalam penyiaran yakni sebelum melakukan kegiatan penyiaran, sehingga apabila penyelenggara penyiaran tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran, sehingga lembaga penyiaran tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penyiaran.¹³

Sehubungan dengan penelitian sebelumnya bahwa ditemukan adanya kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan yaitu membahas mengenai penyiaran televisi dan radio telah beralih dengan penyiaran menggunakan internet. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada perbedaan regulasi mengenai perizinan penyiaran konvensional dengan perizinan penyiaran menggunakan internet serta metode pendekatan komparatif yang akan dilakukan. Maka dari tujuan penulisan ini yaitu untuk membahas mengenai bagaimana urgensi pembaharuan undang-undang penyiaran terhadap perizinan penyiaran berbasis internet di Indonesia dikarenakan adanya perbedaan regulasi mengenai perizinan penyiaran secara konvensional dengan perizinan penyiaran menggunakan internet yang menyebabkan perlakuan tidak sama dan bagaimana pengaturan yang sesuai terkait dengan perizinan penyiaran internet di Indonesia.

37
¹² Ahmad Budiman, "Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran," *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* XIV, no. 7 (2022): 2.

¹³ Adi Permana Sidik Witri Cahyati, Roni Tabroni, "Strategi Media Penyiaran Dalam Membuat Program Siaran Yang Sehat Bagi Publik," *Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2020): 12, <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/buanakomunikasi/article/view/538>.

2. METODE

Metode penelitian adalah suatu proses atau langkah-langkah sebagai sumber terhadap objek yang diteliti guna mencari informasi berupa data suatu penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian dengan kajian ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta mengkaji objek suatu permasalahan yang akan diteliti.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan komparatif dengan negara lain seperti contoh Turki mengenai regulasi yang berlaku tentang penyiaran berbasis internet. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif membahas tentang urgensi pembaharuan Undang-Undang penyiaran mengenai perizinan peraturan penyiaran berbasis internet di Indonesia serta komparasi mengenai pengaturan perizinan penyiaran berbasis internet dari berbagai negara seperti contoh negara Turki. Pendekatan yuridis ini berdasarkan sumber dari bahan primer yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, *The Law No 6112 on the Establishment of Radio and Television Enterprises And Their Media Services, By Law On The Provision of Radio, Television and On-Demand Media Services via Internet*. Adapun bahan hukum sekunder dari jurnal hukum, buku, wawancara dan data dari suatu artikel dan juga hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Perizinan Penyiaran Berbasis Internet di Indonesia.

Penyiaran saat ini terus mengalami perkembangan, hal ini ditunjukkan dari munculnya penyiaran digital. Perkembangan digitalisasi yang bergerak semakin cepat dan mendorong munculnya berbagai platform digital baru guna memudahkan kebutuhan masyarakat.¹⁶ Munculnya platform digital saat ini merupakan suatu akibat dari terjadinya proses digitalisasi yang dilakukan oleh manusia sekarang. Sehingga media penyiaran saat ini terus berkembang, tidak hanya melalui media televisi dan radio, namun berkembang dan disebarluaskan melalui jaringan internet, salah satu contohnya adalah media sosial.¹⁷ Internet saat ini dimanfaatkan sebagai media baru karna internet dan media baru berkaitan satu sama lain seperti internet

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015).

¹⁶ Ahmad Budiman, Op Cit hal 2.

¹⁷ Riza Ananda Putra, Op Cit Hal 5.

dijadikan wadah untuk mengakses ke media baru dan dari media baru ini akan dihubungkan ke media lain melalui internet. Sehingga internet berfungsi untuk menghubungkan antara media dengan penonton, hal ini merupakan contoh perubahan dalam dunia penyiaran karena munculnya penyesuaian dalam media konvensional dan media baru.¹⁸

Penyiaran yang menggunakan platform digital merupakan suatu tren pilihan untuk masyarakat agar mendapatkan sebuah siaran, yaitu untuk memperoleh informasi. Adapun contoh penyiaran menggunakan platform digital, yakni media sosial mencakup *Youtube Live*, *Instagram Live*, dan *channel TV* yang ditampilkan pada *website*. Media tersebut menggunakan jaringan internet yang memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi. Platform digital tersebut muncul karena adanya perkembangan teknologi dan komunikasi seperti internet yang terus berkembang pesat.

Salah satu contoh perkembangan penyiaran online adalah dengan hadirnya penyiaran radio streaming. Radio streaming merupakan sebuah perkembangan dari radio yang ditransmisikan dengan internet agar lingkup dan cakupannya lebih luas dibandingkan dengan saluran biasa.¹⁹ Berdasarkan data survei dari Nielsen Indonesia menyatakan bahwa streaming radio mengalami peningkatan yang cukup tinggi, terutama di kota Jakarta yang mengalami peningkatan streaming radio tertinggi daripada kota lainnya yaitu sebesar 17% atau sekitar 2.7 juta orang yang memilih untuk mendengarkan radio streaming, hal ini lebih tinggi dua kali lipat dari periode April 2019 sampai Maret 2020.²⁰

Penyiaran televisi juga mengalami perubahan, yaitu dapat kita lihat dari perubahan budaya menonton televisi dan perkembangan dari *handphone*. Penyiaran televisi saat ini dipermudah karena siaran televisi saat ini dapat ditonton secara *streaming* yang bisa dilakukan dimana saja dan dengan waktu kapan saja, ditambah dengan hadirnya aplikasi televisi seperti *vidio.com*, RCTI+, Vision+ yang bisa ditemukan di *google play store* atau *App store*. Adanya aplikasi televisi ini dapat mempermudah untuk menonton televisi dimana saja hanya dengan koneksi internet.²¹

¹⁸ Ramsiah Tasruddin and Fauziah Astrid, "Efektivitas Industri Media Penyiaran Modern 'Podcast' Di Era New Media," *Al-MUNZIR* 14, no. 2 (2021): 211–30, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/view/3245>.

¹⁹ Jandy Suwardinata et al., "Sistem Radio Streaming Berbasis Android Studi Kasus: Panji Tv Pontianak," *Jurnal Komputer Dan Aplikasi* 10, no. 01 (2022): 61, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcskommipa/article/view/52480>.

²⁰ Hellen Katherina, "Radio Bicara Fakta?," 2021, <https://radioindonesia.co.id/news-detail/radio-bicara-fakta>.

²¹ Rangga Saptya et al., "Budaya Menonton Televisi Di Indonesia : Dari Terrestrial Hingga Digital Culture of Watching Television in Indonesia : From Terrestrial To Digital," *Jurnal Kajian Televisi Dan Film* 3, no. 1 (2019): 53–67.

Dari hal tersebut perusahaan penyiaran harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, agar dapat mempertahankan eksistensinya, saat ini persaingan bisnis dalam industri media dipengaruhi oleh teknologi yang semakin berkembang,²² Oleh karena itu mulai beralih penyiaran secara konvensional menjadi penyiaran menggunakan internet.

Bahwa penyiaran internet disebut layanan audio visual melalui internet. Penyiaran internet tersebut adalah istilah untuk memudahkan dalam penyebutan, namun penyiaran dengan layanan audio visual melalui internet berbeda konsep dari sisi teknologi yang digunakan, yaitu penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio, sedangkan layanan audio visual melalui internet menggunakan jaringan telekomunikasi internet. Oleh karena itu, pengaturan antara layanan audio visual dengan penyiaran berbeda atas dasar penyiaran tunduk pada UU Penyiaran dan layanan audio visual tunduk pada UU Telekomunikasi, selanjutnya disebut UU Telekomunikasi sebagai penyelenggara sistem elektronik.²³

Dengan demikian, terdapat perbedaan mengenai perizinan dari kedua hal tersebut, yaitu mengenai perizinan penyiaran secara konvensional tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 46 2021 yaitu lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan penyiaran harus memperoleh izin penyelenggara penyiaran (IPP) dengan memenuhi persyaratan perizinan berusaha. Kemudian untuk memperoleh izin tersebut penyelenggara penyiaran harus melakukan terlebih dahulu melakukan uji kelayakan operasi penyiaran. Untuk melakukan uji kelayakan operasi penyiaran harus menyediakan terlebih dahulu sarana dan prasarana. Kemudian akan memperoleh surat keterangan bahwa layak operasi penyiaran, dan izin penyelenggara penyiaran (IPP) dapat berlaku selama 10 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan. Kemudian mengenai perizinan penyelenggara penyiaran melalui internet yang tunduk pada UU Telekomunikasi. Layanan audio visual melalui internet masuk kategori dalam penyelenggara sistem elektronik yang wajib untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan melakukan cara yaitu dapat mengajukan kepada Menteri melalui sistem pelayanan perizinan berusaha. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2)

²² Gilang Gusti and Anzisa Ismaqurotin, "STRATEGI DIVERSIFIKASI BISNIS TELEVISI LOKAL MELALUI PLATFORM DIGITAL (Studi Kasus Pada SBO TV)," *Commercium* 03, no. 02 (2012): 1-5.

²³ Wawancara dengan Bapak Indra Maulana, Ketua bagian hukum dan kerjasama Kementerian komunikasi dan Informatika, Pada hari Selasa 29 November 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut PP 71 Tahun 2019.²⁴

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya ketidakharmonisan regulasi yang menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha dalam melakukan proses perizinan antara penyiaran yang dilakukan secara konvensional dengan penyiaran menggunakan internet. Hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip kesamaan di dalam hukum yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan dalam hal ini warga negara mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum berdasarkan UU. Perbedaan perlakuan mengenai regulasi perizinan penyiaran secara konvensional dan penyiaran menggunakan internet menimbulkan suatu ketidakadilan. Berdasarkan pendapat dari ahli Hans Kelsen dalam buku karangan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at menyatakan bahwa aturan yang diterapkan pada semua hal dimana dalam isi aturan tersebut harus diterapkan, kemudian tidak adil adalah apabila aturan diterapkan pada hal yg satu namun tidak diterapkan di hal yang lain.²⁵ Selain dari alasan uji materiil yang dilakukan oleh pemohon yaitu stasiun televisi yakni RCTI dan INews TV bahwa dengan adanya perbedaan perlakuan tersebut antara penyelenggara penyiaran baik secara konvensional atau berbasis internet ini menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi penyelenggara penyiaran konvensional.²⁶ Dikarenakan dari perkembangan teknologi internet yang membuat masyarakat beralih menonton siaran melalui media baru seperti media sosial dan Youtube, hal ini membuat televisi mengalami penurunan dalam jumlah penonton.²⁷

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik melalui hasil dari pendataan Survei Susenas tahun 2021, yakni penduduk Indonesia dalam mengakses internet di tahun 2021 sebesar 62.10%.²⁸ Kemudian, ditambahkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet tahun 2021-2022 bahwa sebesar 77.02% atau sebesar 210 juta jiwa penduduk Indonesia yang telah terkoneksi internet. Di Indonesia saat ini memulai

²⁴ Hanifan Niffari, "Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya," *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 26.

²⁵ Ali Syafa'at & Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Agung Konstitusi RI, 2006).

²⁶ "Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020" (2020).

²⁷ Ahsanul Haikal Fikri, "Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Televisi Di Indonesia," *Kumparan.com*, 2022, <https://kumparan.com/ahsanul-haikal-fikri/dampak-perkembangan-teknologi-terhadap-televisi-di-indonesia-1yFRRPqk81U>.

²⁸ Badan Pusat Statistik, "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021," *Badan Pusat Statistik*, 2021, Jakarta.

era digital internet sehingga masyarakat Indonesia lebih suka menghabiskan waktu untuk menonton siaran-siaran digital melalui internet dari pada siaran di televisi.²⁹ Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa teknologi internet sudah semasif seperti penyiaran secara konvensional.

Dengan demikian adanya ketidakharmonisan regulasi mengenai perizinan antara penyiaran secara konvensional dan penyiaran menggunakan internet menyebabkan perlakuan tidak sama di dalam hukum sehingga menyebabkan suatu ketidakadilan. Dari hal tersebut terdapat urgensi pembaharuan Undang-Undang Penyiaran mengenai perizinan penyiaran internet di Indonesia.

3.2 Pengaturan yang Sesuai terkait dengan Perizinan Penyiaran Internet di Indonesia.

Bahwa perbedaan regulasi antara penyiaran secara konvensional dengan penyiaran menggunakan internet di Indonesia, maka mengenai perizinan penyiaran keduanya juga diatur dalam regulasi yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan perbedaan perlakuan antara pelaku usaha penyiaran secara konvensional dengan pelaku usaha penyiaran menggunakan internet.

Berbeda dengan Turki yaitu pengaturan mengenai penyiaran diatur dalam *The Law No 6112 on the Establishment of Radio and Television Enterprises And Their Media Services*, selanjutnya disebut *Law No. 6112*. Aturan ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur, mengawasi bagi layanan radio, televisi dan media *on demand* yang mentransmisikan melalui berbagai teknis, metode dan gelombang elektromagnetik. Dalam aturan ini mengatur mengenai siaran analog yaitu siaran melalui kabel, satelit dan terrestrial maupun sejenisnya yang menggunakan teknik analog.³⁰

Berdasarkan *Article 19 (1) huruf a Law No. 6112* menyatakan bahwa perusahaan yang menyediakan layanan penyiaran radio, layanan penyiaran televisi dan layanan media dengan permintaan secara eksklusif harus mengajukan lisensi penyiaran kepada Dewan Tertinggi, dan lisensi penyiaran diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dagang Turki.

Kemudian berdasarkan *article 27 ayat (1) dan (2) Law No. 6112* menyatakan bahwa penyedia jasa media yang mengajukan permohonan

²⁹ Finna Prima Handayani and Ika Merdekawati, "Kebijakan Penggunaan Media Online Website Kompas TV Dan Youtube Untuk Menyalurkan Konten 'Eksklusif Digital' Kompas TV," *Jurnal Kajian Jurnalisme 2*, no. 2 (2019): 198–211, <https://doi.org/10.24198/jkj.v2i2.21361>.

kepada Dewan Tertinggi mengenai izin penyiaran untuk setiap teknik dan jaringan penyiaran agar mencantumkan dengan jelas mengenai teknik penyiaran serta jaringan yang akan diberikan izin. Selanjutnya perusahaan yang meminta mengajukan untuk melakukan siaran serentak pada jaringan berbeda dan dengan teknik yang berbeda harus mengajukan izin terpisah untuk setiap teknik dan jaringan penyiaran dan harus menyediakan siaran serentak. Izin penyiaran ini diberikan jangka waktu selama 10 tahun dan setiap perusahaan yang telah diberikan izin penyiaran terrestrial oleh Dewan Tertinggi tidak dapat mengalihkan hak lisensinya.

Kemudian mengenai pengaturan penyiaran internet diatur dalam aturan turunan yaitu *The Radio and Television Supreme Council and the information and communication technologies authority* (RTUK) dengan menerbitkan aturan mengenai regulasi penyiaran berbasis internet di dalam *By Law On The Provision of Radio, Television and On-Demand Media Services via Internet Environment*.³¹ Dewan Tertinggi menerbitkan aturan tersebut berdasarkan Pasal 29/A *Law No 6112* yaitu untuk memberikan lisensi siaran kepada penyedia dan otorisasi transmisi siaran kepada operator platform, dan tata cara serta asas mengenai pengawasan siaran yang bersangkutan dan pelaksanaan pasal ini, maka dikeluarkan Bersama Dewan Tertinggi dan Otoritas Teknologi dan Komunikasi Informasi.³²

Berdasarkan Pasal 29/A yang ditambahkan di *Law No. 6112* bahwa penyelenggara jasa media yang dalam hal ini telah memiliki hak siar sementara maupun izin siaran dari Dewan Tertinggi sesuai dengan *Law No. 6112* dan *Law No. 5651*. Maka penyedia layanan media yang ingin menyediakan radio, televisi dan layanan penyiaran berdasarkan internet harus memiliki lisensi siaran yang diperoleh dari Dewan Tertinggi.³³ Namun dalam peraturan ini dalam *Article 2(1)* terdapat pengecualian yaitu hanya mencakup penyedia layanan radio, televisi dan layanan sesuai permintaan melalui internet, penyedia layanan media swasta yang menyediakan layanan media online, dan untuk layanan komunikasi individual tidak termasuk dalam lingkup peraturan tersebut.

Dalam peraturan ini tercantum mengenai siaran televisi online, siaran radio online dan layanan media sesuai permintaan online, yang

³² Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği, “‘İNTERNET YAYINCILIĞI’NIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME,” 18-027, 2018, <https://telkoder.org.tr/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-15-internetYayinciligiDuzenlemeBTK.pdf>.

³³ Merve Ergüney, “RTÜK’ün İnternet Denetimi: İlgili Mevzuat Üzerine Bir Değerlendirme,” *AJITE: Online Academic Journal of Information Technology* 11, no. 41 (2020): 96–122, <https://doi.org/10.5824/ajite.2020.02.005.x>.

intinya menggunakan media internet. Berdasarkan *Article 5(1)* dan (2) menyatakan bahwa penyelenggara jasa media yang memiliki hak siar sementara atau izin siaran yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung yang menyelenggarakan juga jasa mediana melalui lingkungan internet terlebih dahulu harus memperoleh izin penyiaran daring atau *online* dari Dewan Tertinggi atau disebut RTUK. Izin penyiaran daring ini diberikan berbeda yaitu untuk siaran radio online maka diberikan izin penyiaran Internet-RD, untuk izin penyiaran televisi online diberikan Internet-TV, dan untuk izin penyiaran layanan media on demand diberikan Internet-IBYT.

Untuk memperoleh izin penyiaran daring, berdasarkan *Article 7* bahwa penyedia penyiaran radio, televisi dan layanan on demand yang menggunakan internet harus mendirikan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Dagang Turki (*Turkish Commercial Code*). Izin penyiaran daring tersebut diberikan jangka waktu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya dua bulan sebelum waktu berakhir.

Negara Turki yang telah mengatur mengenai penyiaran internet dikarenakan adanya perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh terhadap media dengan cara yang berbeda seperti contoh internet yang memberikan kontribusi pada radio, dan televisi serta media cetak. Meningkatnya internet memungkinkan perubahan terhadap mendengarkan radio dan menonton televisi dengan media baru.³⁴ Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Turkish Statistical Institute (TurkStat) di tahun 2021 mengungkapkan bahwa pengguna internet sebesar 82.6% yang digunakan oleh usia 16-74 tahun, dan sebesar 70.8% adalah pengguna media sosial dari total penduduk.³⁵ Tingginya pengguna internet dan media sosial di Turki membawa pengaruh kepada platform-platform digital dan industri penyiaran.

Regulasi mengenai perizinan penyiaran di Turki antara penyiaran secara analog atau konvensional dengan penyiaran melalui internet sama-sama harus mendapatkan izin penyiaran dan untuk penyiaran melalui internet harus mendapatkan izin penyiaran daring dari RTUK atau Dewan Tertinggi. Untuk memperoleh izin penyiaran harus mendirikan perusahaan sesuai dengan hukum dagang di Turki. Kedua izin penyiaran tersebut berlaku selama 10 tahun. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa regulasi mengenai perizinan penyiaran antara

³⁴ MIHALIS KUYUCU, "The Convergence of Internet and Radio in Turkey in the Perspective of Distribution and Audience," *Turkish Online Journal of Design, Art and Communication* 4, no. 3 (2014): 40–56, <https://doi.org/10.7456/10403100/004>.

³⁵ Media & Telecoms Technology, "Statue Of Digital Media Platforms And Digital Broadcasting Acts Under Turkish Law," Legal 500, 2022, <https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/status-of-digital-media-platforms-and-digital-broadcasting-acts-under-turkish-law/>.

penyiaran konvensional dan penyiaran menggunakan internet tidak adanya perbedaan.

Berbeda dengan di Indonesia yang terdapat perbedaan regulasi mengenai perizinan antara penyiaran secara konvensional dengan penyiaran menggunakan internet. Menurut penulis bahwa Indonesia dapat melakukan penyesuaian dari aturan yang telah diterapkan di Turki tersebut dengan melakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yaitu memperluas ruang lingkup penyiaran, dan memasukkan penyiaran internet dalam lingkup penyiaran. Diharapkan dengan memperluas ruang lingkup penyiaran, maka tidak adanya perbedaan regulasi perizinan penyiaran antara penyiaran secara konvensional dengan penyiaran menggunakan internet, hal ini sesuai dengan kesamaan di dalam hukum yang sesuai dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

4. PENUTUP

Bahwa adanya ketidaharmonisan regulasi mengenai perizinan penyiaran secara konvensional dan penyiaran menggunakan internet mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda dalam proses perizinan yang menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi penyelenggara penyiaran secara konvensional, Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kesamaan hukum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sehingga adanya urgensi mengenai pembaharuan UU Penyiaran khususnya mengenai perizinan. Dalam hal ini Indonesia dapat menyesuaikan atau mencontoh dari peraturan penyiaran internet di Turki yakni dengan melakukan pembaharuan Undang-Undang Penyiaran yaitu memperluas pengertian penyiaran serta memasukkan ruang lingkup penyiaran internet, agar mengenai perizinan penyiaran secara konvensional dan penyiaran menggunakan internet mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "Profil Internet Indonesia 2022." *Apji.or.Od*, no. June (2022): 10. apji.or.id.
- Budiman, Ahmad. "Penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran." *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Stategis XIV*, no. 7 (2022): 2.
- Derneği, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri. "“İNTERNET YAYINCILIĞI'NIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME.” 18-027, 2018. <https://telkoder.org.tr/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-15-internetYayinciligiDuzenlemeBTK.pdf>.
- Ergüney, Merve. "RTÜK'ün İnternet Denetimi: İlgili Mevzuat Üzerine Bir Değerlendirme." *AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology* 11, no. 41 (2020): 96–122. <https://doi.org/10.5824/ajite.2020.02.005.x>.
- Fikri, Ahsanul Haikal. "Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Televisi Di Indonesia." *Kumparan.com*, 2022. <https://kumparan.com/ahsanul-haikal-fikri/dampak-perkembangan-teknologi-terhadap-televisi-di-indonesia-1yFRRPqk81U>.
- Gusti, Gilang, and Anziza Ismaqurotin. "STRATEGI DIVERSIFIKASI BISNIS TELEVISI LOKAL MELALUI PLATFORM DIGITAL (Studi Kasus Pada SBO TV)." *Commercium* 03, no. 02 (2012): 1–5.
- Handayani, Finna Prima, and Ika Merdekawati. "Kebijakan Penggunaan Media Online Website Kompas TV Dan Youtube Untuk Menyalurkan Konten 'Eksklusif Digital' Kompas TV." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 2, no. 2 (2019): 198–211. <https://doi.org/10.24198/jkj.v2i2.21361>.
- Imansyti Ciptanti Devi, Dr. Iswahyudi., M.Ag. "Strategi Konvergensi Radio Songgolangit FM Di Tengah Persaingan Industri Penyiaran Di Ponorogo," 2020.
- Jimly Asshiddiqe, Ali Syafa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Agung Konstitusi RI, 2006.
- Kalaycioglu, Elif, and Dragan Nikodijević. "Radio and Television Supreme Council: Regulation on Internet Broadcasting in Turkey." *Komunikacije, Mediji, Kultura* 11, no. 11 (2019): 89–100. <https://doi.org/10.5937/gfkm1911089x>.
- Katherina, Hellen. "Radio Bicara Fakta?," 2021. <https://radioindonesia.co.id/news-detail/radio-bicara-fakta>.
- Kurnia, Septiawan Santana. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- KUYUCU, MİHALİS. "The Convergence of Internet and Radio in Turkey in the Perspective of Distribution and Audience." *Turkish Online Journal of Design, Art and Communication* 4, no. 3 (2014): 40–56. <https://doi.org/10.7456/10403100/004>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mokhammad Naigam Mahriva, Eka Wenats Wuryanata. "DOMINASI KEKUASAAN PEMILIK MEDIA DALAM WACANA PEMBARUAN UU PENYIARAN POWER DOMINATION OF MEDIA OWNERS IN THE DISCUSSION OF UPDATING THE BROADCASTING LAW." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 25, no. 1 (2021): 77. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/3766>.

- Munthe, Reyhan Agung, OK. Saidin, Jelly Leviza, and Abd. Harris. "Analisis Yuridis Penyedia Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet Dengan Layanan Konten Melalui Spectrum Televisi Dan Radio." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 2 (2022): 130–42. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.61>.
- Nabilah, Fitria Safiratun, Jessica Wiguna, Noerazrie Imania Putri, Roziana Febrianita, and Analisa Framing. "Menggugat UU Penyiaran Di Indonesia (Analisa Framing Pemberitaan Gugatan RCTI Dan INews TV Tentang UU 32 Tahun 2002 Pada SindoNews & Detik.Com Periode 27 Agustus-20 September 2020)." *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 9, no. 2 (2021): 74. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna/article/view/15860>.
- Niffari, Hanifan. "Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya." *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 26.
- Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020 (2020).
- Riza Ananda Putra. "Konsekuensi Hukum Tindakan Penyiaran Oleh Media Sosial Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran," 2021.
- Saptya, Rangga, Mohamad Permana, Aceng Abdullah, Narotama Mahameruaji, and Universitas Padjadjaran. "Budaya Menonton Televisi Di Indonesia : Dari Terrestrial Hingga Digital Culture of Watching Television in Indonesia : From Terrestrial To Digital." *Jurnal Kajian Televisi Dan Film* 3, no. 1 (2019): 53–67.
- Silaban, Alvin Daniel, Muhammad Amirulloh, and Laina Rafianti. "Podcast: Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over the Top) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (2020): 129–43. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.8325>.
- Simanjuntak, Billy Nikolas. "Konvensional Dan Penyediaan Layanan Aplikasi Dan / Atau Konten Melalui Internet Over-the-Top Dalam Perpektif Persaingan Usaha Yang Adil." *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (2021): 1707. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=dharmasisya>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Statistik, Badan Pusat. "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021." *Badan Pusat Statistik*, 2021. Jakarta.
- Suwardinata, Jandy, Dian Prawira, Ferdy Febriyanto, and Jurusan Sistem Informasi. "Sistem Radio Streaming Berbasis Android Studi Kasus: Panji Tv Pontianak." *Jurnal Komputer Dan Aplikasi* 10, no. 01 (2022): 61. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcskommipa/article/view/52480>.
- Tasruddin, Ramsiah, and Fauziah Astrid. "Efektivitas Industri Media Penyiaran Modern 'Podcast' Di Era New Media." *Al-MUNZIR* 14, no. 2 (2021): 211–30. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/view/3245>.
- Technology, Media& Telecoms. "Statue Of Digital Media Platforms And Digital Broadcasting Acts Under Turkish Law." *Legal 500*, 2022. <https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/status-of-digital-media-platforms-and-digital-broadcasting-acts-under-turkish-law/>.

Witri Cahyati, Roni Tabroni, Adi Permana Sidik. "Strategi Media Penyiaran Dalam Membuat Program Siaran Yang Sehat Bagi Publik." *Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2020): 12.
<http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/buanakomunikasi/article/view/538>.

Turniti Jurnal Tina

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | journals.usm.ac.id Internet Source | 1% |
| 2 | eprints.ubhara.ac.id Internet Source | 1% |
| 3 | Submitted to University of Westminster Student Paper | 1% |
| 4 | ojs.unud.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | www.mondaq.com Internet Source | <1% |
| 6 | jurnal.usbypkp.ac.id Internet Source | <1% |
| 7 | repository.bsi.ac.id Internet Source | <1% |
| 8 | Submitted to Udayana University Student Paper | <1% |
| 9 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | <1% |

| | | |
|----|---|------|
| 10 | jurnalekonomi.unisla.ac.id Internet Source | <1 % |
| 11 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | <1 % |
| 12 | jurnal.locusmedia.id Internet Source | <1 % |
| 13 | kliklegal.com Internet Source | <1 % |
| 14 | repository.ub.ac.id Internet Source | <1 % |
| 15 | www.jogloabang.com Internet Source | <1 % |
| 16 | www.rtuk.gov.tr Internet Source | <1 % |
| 17 | 123dok.com Internet Source | <1 % |
| 18 | dergipark.org.tr Internet Source | <1 % |
| 19 | openaccess.hacettepe.edu.tr:8080 Internet Source | <1 % |
| 20 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | <1 % |
| 21 | www.legal500.com Internet Source | <1 % |

22 Febia Salwa Pandora, Edmon Makarim.
"IMPLICATIONS OF USING ELECTRONIC
STAMP DUTY AS PROOF OF AUTHENTICITY OF
ELECTRONIC DOCUMENTS IN INDONESIA",
Cepalo, 2022
Publication <1 %

23 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Student Paper <1 %

24 jurnal.unpad.ac.id
Internet Source <1 %

25 repository.iiq.ac.id
Internet Source <1 %

26 seminar.stfm.ac.id
Internet Source <1 %

27 www.mkri.id
Internet Source <1 %

28 acikbilim.yok.gov.tr
Internet Source <1 %

29 core.ac.uk
Internet Source <1 %

30 digilib.uinsgd.ac.id
Internet Source <1 %

31 ejournal.urindo.ac.id
Internet Source <1 %

eprints.ums.ac.id

| | | |
|----|---|------|
| 32 | Internet Source | <1 % |
| 33 | fokus.kontan.co.id Internet Source | <1 % |
| 34 | journal.unpad.ac.id Internet Source | <1 % |
| 35 | peraturan.go.id Internet Source | <1 % |
| 36 | repository.itelkom-pwt.ac.id Internet Source | <1 % |
| 37 | sirisma.unisri.ac.id Internet Source | <1 % |
| 38 | text-id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 39 | www.grafiati.com Internet Source | <1 % |
| 40 | kpi.go.id Internet Source | <1 % |
| 41 | www.indonesiana.id Internet Source | <1 % |
| 42 | Putra Aditya Lapalelo. "The Pseudo-Low Price' Trap by "Go-Food and Grab Food" Online Food Delivery Services", Jurnal Spektrum Komunikasi, 2022 Publication | <1 % |

| | | |
|----|---|------|
| 43 | digilib.uin-suka.ac.id Internet Source | <1 % |
| 44 | e-journal.ikhac.ac.id Internet Source | <1 % |
| 45 | ejournal.undiksha.ac.id Internet Source | <1 % |
| 46 | www.scilit.net Internet Source | <1 % |
| 47 | www.stptower.com Internet Source | <1 % |
| 48 | Mohamad Rivaldi Moha, Sukarmi Sukarmi, Afifah Kusumadara. "Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce", <i>Jambura Law Review</i> , 2020 Publication | <1 % |
| 49 | Mokhammad Naigam Mahriva, Eka Wenats Wuryanata. "Power Domination of Media Owners in The Discussion of Updating The Broadcasting Law", <i>JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK</i> , 2021 Publication | <1 % |
| 50 | jurnal.unissula.ac.id Internet Source | <1 % |
| 51 | www.researchgate.net Internet Source | <1 % |

52 Submitted to October University for Modern Sciences and Arts (MSA) <1 %
Student Paper

53 jurnal.untan.ac.id <1 %
Internet Source

54 megatrend.edu.rs <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On